



Media Title	Kompas	
Date	9 Oktober 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	10	Article Size
Journalist	ARN	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

TRANSPORTASI

Asosiasi Tol Tolak Penambahan Indikator

JAKARTA, KOMPAS — Asosiasi Tol Indonesia menolak rencana Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum menambahkan dua indikator dalam penilaian standar pelayanan minimum. Pasalnya, kedua indikator itu tidak berkaitan dengan pengelola jalan tol, tetapi terkait pihak lain di luar wewenang jalan tol. Demikian dikatakan Ketua Asosiasi Tol Indonesia Fatchur Rohman, di Jakarta, Rabu (8/10).

Kepala Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol Christian Kornel Sihalo dalam kesempatan terpisah mengatakan akan menambahkan indikator standar pelayanan minimum (SPM) berupa kebersihan lingkungan dan kelayakan tempat istirahat atau *rest area*. Sebelumnya, indikator SPM hanya enam, yakni kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, dan unit pertolongan pertama. Penambahan dua indikator ini menurut rencana dimasukkan dalam draf revisi Peraturan Men-

teri Pekerjaan Umum Nomor 392 Tahun 2005 tentang SPM Jalan Tol yang sedang disusun.

"Kebersihan lingkungan ini sangat penting karena sering kali terlihat jalan tol kotor akibat banyaknya kertas tiket tol yang tersebar di jalan. Pengelola jalan tol harus bisa menjaga agar pengendara tidak membuang tiketnya sembarangan," kata Kornel.

Menurut Fatchur, kebersihan lingkungan yang diukur banyaknya kertas tiket tol yang tersebar dilakukan oleh para pengendara yang tidak mau mengambil kertas tiketnya. "Kami sebenarnya juga lebih senang tidak pakai kertas tiket. Namun, banyak pihak-pihak yang membutuhkan kertas tiket itu sebagai tanda bukti. Hanya, banyak juga pengendara yang merasa tidak perlu kertas itu sehingga membuangnya di jalan," katanya.

Dia mencontohkan, untuk pengendara yang memakai *e-toll pass*, di mana pengendara hanya melaju tanpa berhenti di gerbang tol, akan sangat aneh jika pengendara harus berhenti hanya

untuk mengambil kertas.

Sementara mengenai *rest area*, menurut dia, bukan dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), melainkan oleh manajemen sendiri. "Jadi, jika kedua indikator ini dimasukkan dalam penilaian SPM, tentu tidak adil karena keduanya di luar domain BUJT. Seharusnya sosialisasi dan kampanye untuk kebersihan dilakukan bersama-sama," ujar Fatchur.

Penilaian SPM sangat penting karena akan menentukan boleh atau tidaknya tarif tol naik. Jika BUJT tidak bisa mencapai SPM, walaupun sudah dijadwalkan untuk naik tarif, ruas tol itu tidak boleh naik.

Dalam penilaian SPM Semester I-2014, Kornel mengatakan, semua ruas jalan tol yang berjumlah 29 ruas telah memenuhi SPM. Jika prestasi itu tetap terjaga, pada 2015 ada 22 ruas tol yang diperbolehkan naik tarif. Kenaikan tarif pada 2015 tidak akan serempak. "Rentang waktunya mulai April hingga Desember," katanya. (ARN)